

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu negara membutuhkan dukungan sistem keuangan yang tangguh, efisien, dan stabil untuk memobilisasi sumber daya secara optimal. Dalam arsitektur perekonomian Indonesia, sektor perbankan memegang peranan yang sangat dominan (*bank-based economy*) sebagai urat nadi sistem keuangan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Keberhasilan perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi ini sangat bergantung pada kapasitasnya dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan sumber likuiditas utama bagi perbankan yang mencakup lebih dari 80 persen dari total kewajiban (*liabilitas*) bank umum di Indonesia. Stabilitas penghimpunan DPK tidak hanya krusial bagi kelangsungan operasional bank itu sendiri, tetapi juga menentukan kapasitas ekspansi kredit ke sektor riil, yang pada gilirannya akan memutar roda investasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Oleh karena itu, menjaga tingkat kepercayaan masyarakat

untuk terus menempatkan dananya di perbankan merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya stabilitas sistem keuangan (SSK).

Penelitian ini memfokuskan analisis pada Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum karena bank umum merupakan institusi yang mendominasi sistem perbankan Indonesia baik dari sisi aset, kredit, maupun penghimpunan dana masyarakat. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, sebagian besar dana masyarakat tersimpan pada bank umum sehingga pergerakan DPK bank umum dapat merepresentasikan kondisi penghimpunan dana nasional secara lebih komprehensif dibandingkan jenis lembaga perbankan lainnya. Selain memiliki jaringan layanan yang lebih luas, bank umum juga berperan sebagai penggerak utama fungsi intermediasi keuangan yang menghubungkan sektor rumah tangga, dunia usaha, dan pemerintah. Oleh karena itu, perubahan perilaku penghimpunan DPK pada bank umum menjadi indikator penting dalam menilai stabilitas sistem keuangan dan respons masyarakat terhadap dinamika makroekonomi.

Dominasi Dana Pihak Ketiga sebagai sumber pendanaan utama perbankan juga ditemukan pada sebagian besar negara berkembang yang memiliki struktur sistem keuangan berbasis perbankan (*bank-based financial system*). Dalam struktur tersebut, ketahanan penghimpunan dana masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan stabilitas intermediasi keuangan dan ketahanan likuiditas perbankan (Demirgüç-Kunt & Huizinga, 2009). Selain itu, Adrian dan Shin (2010) menjelaskan bahwa struktur pendanaan berbasis simpanan domestik cenderung lebih stabil dibandingkan pembiayaan pasar uang jangka pendek, terutama pada periode krisis ekonomi global (Adrian & Shin, 2010).

Dinamika perekonomian global dalam satu dekade terakhir telah diwarnai oleh tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, yang secara langsung menguji ketahanan sektor finansial di berbagai negara. Laporan *World Economic Outlook* yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF, 2023) menggarisbawahi bahwa guncangan beruntun mulai dari krisis pandemi COVID-19 hingga eskalasi ketegangan geopolitik global telah memicu disrupti rantai pasok yang berujung pada lonjakan inflasi di berbagai kawasan. Fenomena inflasi global ini memaksa bank sentral di negara-negara maju untuk merespons dengan pengetatan kebijakan moneter secara agresif, seperti kenaikan suku bunga acuan secara masif. Kondisi makroekonomi global yang bergejolak ini tidak hanya berdampak pada pelemahan pertumbuhan sektor riil, tetapi juga secara langsung menciptakan tekanan pada struktur pendanaan perbankan. Hal ini terjadi karena deposan dan investor di seluruh dunia dihadapkan pada risiko penurunan daya beli uang fiat mereka, yang menuntut adanya penyesuaian strategi alokasi kekayaan secara cepat.

Ketidakpastian makroekonomi global tidak hanya memengaruhi stabilitas sektor riil, tetapi juga mengubah perilaku penyimpanan aset masyarakat melalui mekanisme *flight to quality* dan *precautionary savings*. Bernanke (1983) menyatakan bahwa peningkatan ketidakpastian ekonomi akan meningkatkan preferensi masyarakat terhadap aset yang dianggap lebih aman dan likuid (Bernanke, 1983). Dalam konteks sektor perbankan, kondisi ini dapat menciptakan perubahan mendadak pada struktur simpanan masyarakat serta memengaruhi ketahanan pendanaan bank.

Dalam merespons ketidakpastian global tersebut, literatur keuangan mencatat adanya pergeseran perilaku masyarakat dalam menempatkan dananya, yang memicu tarik-menarik antara sistem perbankan dan instrumen investasi alternatif. Studi empiris oleh Baur dan Smales (2020) menjelaskan bahwa pada periode guncangan makroekonomi yang esktrm, rasionalitas pelaku ekonomi akan mendorong mereka untuk mencari aset pelindung nilai (*safe haven asset*) (Baur & Smales, 2018). Penjelasan dalam studi tersebut menegaskan bahwa emas seringkali menjadi substitusi utama bagi instrumen simpanan konvensional ketika kepercayaan terhadap stabilitas uang menurun, sehingga lonjakan harga emas global umumnya merefleksikan peralihan likuiditas dari sistem keuangan ke aset komoditas. Literatur empiris internasional juga menunjukkan bahwa emas memiliki korelasi negatif terhadap ketidakstabilan pasar keuangan dan sering digunakan sebagai instrumen lindung nilai terhadap inflasi serta depresiasi mata uang domestik (Batten et al., 2014). Bahkan pada negara emerging markets, peningkatan harga emas sering diikuti oleh penyesuaian portofolio rumah tangga dari aset finansial menuju aset riil yang dianggap lebih aman dalam menjaga nilai kekayaan.

Namun di sisi lain, laporan *Global Financial Stability Report* (IMF, 2020) memberikan penjelasan tambahan bahwa dalam kondisi krisis tertentu, masyarakat justru menunjukkan preferensi likuiditas yang sangat tinggi (*dash for cash*). Laporan tersebut memaparkan bahwa alih-alih berinvestasi, masyarakat di beberapa negara berkembang cenderung mengonsolidasikan dananya di bank dalam bentuk simpanan jangka pendek murni untuk motif berjaga-jaga (*precautionary motive*). Perbedaan respons ini mengindikasikan bahwa pengaruh guncangan

makroekonomi seperti perubahan harga emas, volatilitas nilai tukar, dan perubahan suku bunga kebijakan (BI Rate) terhadap kapasitas penghimpunan dana perbankan merupakan isu global yang kompleks dan menghasilkan *outcome* yang bervariasi antarnegara.

Dalam konteks domestik, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber utama pendanaan bank yang berasal dari simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, serta memiliki peran sentral dalam menjaga fungsi intermediasi perbankan. Dalam kerangka teori intermediasi keuangan, kemampuan bank dalam menghimpun DPK menentukan kapasitas penyaluran kredit kepada sektor riil dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Levine, 1997). Selain itu, model perbankan yang dikembangkan oleh Diamond dan Dybvig (1983) menegaskan bahwa stabilitas dana simpanan merupakan prasyarat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, karena gangguan pada sisi pendanaan dapat memicu tekanan likuiditas dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dengan demikian, DPK tidak hanya mencerminkan kinerja penghimpunan dana, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai stabilitas sistem keuangan dan efektivitas fungsi intermediasi.

Eksistensi Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam arsitektur perbankan nasional memegang peranan krusial tidak hanya sebagai sumber likuiditas utama, tetapi juga sebagai variabel esensial yang menentukan arah stabilitas ekonomi makro. Signifikansi peran DPK ini dipertegas oleh temuan Hikmah et al. (2025) yang membuktikan bahwa akumulasi simpanan masyarakat secara empiris menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia (Hikmah et

al., 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian Anggraini (2019) yang mengidentifikasi adanya hubungan kausalitas dua arah (*bi-directional causality*) antara perkembangan sektor perbankan dan dinamika Produk Domestik Bruto (PDB) (Anggraini, 2019). Mengingat posisi DPK sebagai fondasi pertumbuhan yang vital, maka pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor eksternal yang mendikte fluktuasinya menjadi sangat mendesak.

Meskipun DPK memiliki peran vital bagi intermediasi, dinamika likuiditas perbankan di Indonesia sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Perubahan harga emas, nilai tukar, dan BI Rate sering kali menciptakan fluktuasi jangka pendek yang dapat memengaruhi perilaku deposan. Ketidakpastian makroekonomi ini menuntut pemahaman mendalam mengenai seberapa responsif atau seberapa cepat pasar uang domestik menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal agar stabilitas sistem keuangan dapat tetap terjaga.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Berdasarkan data Bank Indonesia, DPK meningkat dari sekitar Rp3.560 triliun pada tahun 2015 menjadi lebih dari Rp7.151 triliun pada tahun 2024. Secara indeks (2014=100), performa penghimpunan dana ini menunjukkan tren pertumbuhan yang solid, di mana indeks DPK berhasil berlipat ganda menyentuh level 200 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemampuan perbankan dalam menghimpun dana masyarakat tetap terjaga, meskipun dihadapkan pada dinamika kondisi makroekonomi yang berfluktuasi. Di sisi lain, variabel makroekonomi yang diduga memengaruhi perilaku simpanan masyarakat menunjukkan volatilitas yang

tinggi. Harga emas mengalami lonjakan yang cukup tajam setelah tahun 2019, nilai tukar rupiah cenderung terdepresiasi secara gradual, dan inflasi mengalami fluktuasi ekstrem dengan lonjakan mendekati 8 persen pada tahun 2022.

Secara teoritis, perubahan variabel makroekonomi tersebut diperkirakan memengaruhi keputusan masyarakat dalam mengalokasikan kekayaannya. Dalam perspektif teori portofolio Markowitz, 1952, individu akan memilih kombinasi aset yang optimal dengan mempertimbangkan risiko dan tingkat keuntungan, sehingga simpanan perbankan bersaing dengan instrumen investasi lain seperti emas dan valuta asing (Markowitz, 1952). Emas dipandang sebagai aset *safe haven* yang cenderung meningkat permintaannya pada saat terjadi ketidakpastian ekonomi (Baur & Lucey, 2010; Baur & McDermott, 2010), sehingga kenaikan harga emas secara teoritis dapat mendorong peralihan dana dari simpanan perbankan ke investasi emas. Sementara itu, dalam kerangka teori permintaan uang yang dikemukakan oleh Friedman, 1956 dan Mishkin, 2007, menyatakan bahwa inflasi yang meningkat akan menurunkan nilai riil uang dan simpanan, sehingga berpotensi mengurangi insentif masyarakat untuk menabung di perbankan (Friedman, 1963; Mishkin, 2007).

Dalam perspektif perilaku deposan, inflasi yang tinggi juga meningkatkan *opportunity cost* memegang uang tunai dan simpanan berbunga rendah, sehingga masyarakat cenderung melakukan rebalancing portofolio menuju aset yang memiliki kemampuan lindung nilai lebih baik terhadap inflasi (Dornbusch & Fischer, 1993). Oleh karena itu, persistensi inflasi dalam jangka panjang secara

teoritis dapat mengurangi stabilitas penghimpunan dana perbankan. Selain itu, dalam model makroekonomi terbuka, fluktuasi nilai tukar mencerminkan kondisi ketidakpastian ekonomi yang dapat memengaruhi preferensi masyarakat terhadap aset domestik dan mendorong diversifikasi ke aset berbasis valuta asing (Obstfeld & Rogoff, 1996).

Namun demikian, fenomena empiris di Indonesia menunjukkan ketidaknormalan yang kontradiktif dengan prediksi teoritis tersebut. Hal ini terkonfirmasi secara visual pada pergerakan data indeks makroekonomi dan DPK selama periode 2015–2024. Berdasarkan Gambar 1 di atas, perkembangan variabel makroekonomi, terlihat jelas bahwa ketika terjadi guncangan ekonomi seperti lonjakan tajam harga emas pada awal pandemi di tahun 2020 dan eskalasi lanjutannya di tahun 2024, serta lonjakan drastis inflasi dari kisaran 1,5 persen menjadi hampir 8 persen pada tahun 2022 garis tren DPK justru tetap menunjukkan kemiringan positif yang stabil tanpa mengalami diskontinuitas atau penurunan. Begitu pula dengan depresiasi nilai tukar yang merayap naik hingga indeks 120, tidak tampak mengganggu laju pertumbuhan DPK. Kondisi ini membuktikan bahwa kenaikan harga aset pesaing emas dan penurunan nilai riil uang akibat inflasi tidak memicu penarikan dana besar-besaran (*capital outflow* dari sistem perbankan). Dengan kata lain, perilaku deposan di Indonesia menunjukkan tingkat inelastisitas yang tinggi terhadap dinamika harga emas, inflasi, dan pelemahan nilai tukar dalam jangka pendek.

Kondisi ini membuktikan bahwa kenaikan harga aset pesaing emas dan penurunan nilai riil uang akibat inflasi tidak memicu penarikan dana besar-besaran

(*capital outflow* dari sistem perbankan). Dengan kata lain, perilaku deposan di Indonesia menunjukkan tingkat inelastisitas yang tinggi terhadap dinamika harga emas, inflasi, dan pelemahan nilai tukar dalam jangka pendek.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pola perkembangan masing-masing variabel selama periode penelitian, disajikan tren Dana Pihak Ketiga (DPK), harga emas dunia, inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada gambar berikut.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Sebagai sumber pendanaan utama perbankan, perkembangan DPK menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan terhadap perkembangan DPK selama periode penelitian untuk memahami pola penghimpunan dana masyarakat pada sektor perbankan.

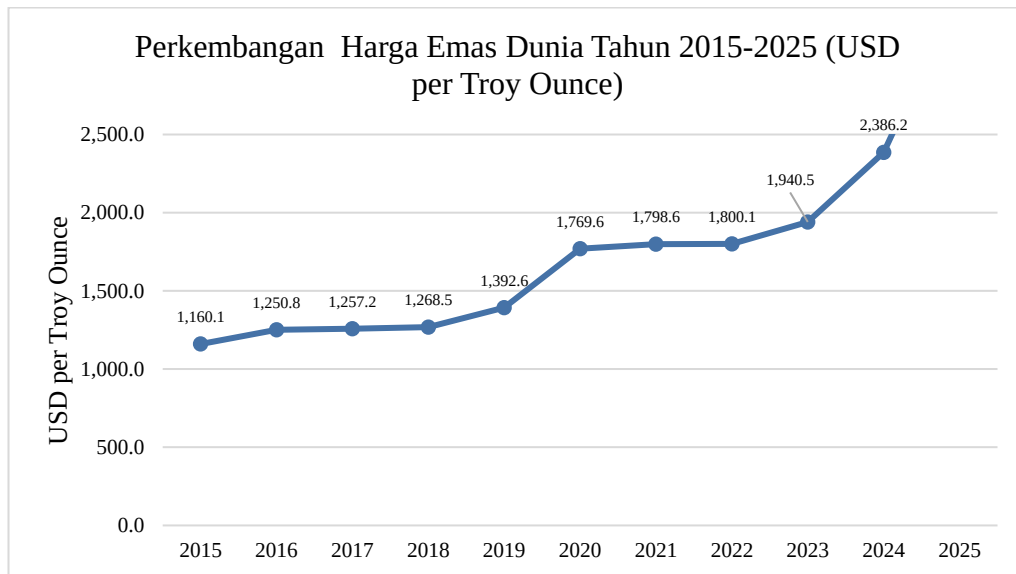


Gambar 1.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum di Indonesia Tahun 2015-2025

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.1, Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten selama periode 2015–2025. Nilai DPK meningkat dari Rp3.560.616,74 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp7.454.669,189 miliar pada tahun 2025. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tetap terjaga meskipun perekonomian menghadapi berbagai tekanan, termasuk pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi global. Secara umum, peningkatan DPK mencerminkan kemampuan perbankan dalam mempertahankan fungsi penghimpunan dana sebagai fondasi utama kegiatan intermediasi keuangan.

Meskipun DPK menunjukkan tren peningkatan, keputusan masyarakat dalam menyimpan dana di bank tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor makroekonomi. Salah satu variabel yang sering dikaitkan dengan perilaku penyimpanan dana adalah harga emas yang berfungsi sebagai alternatif instrumen investasi dan penyimpan nilai (*store of value*).



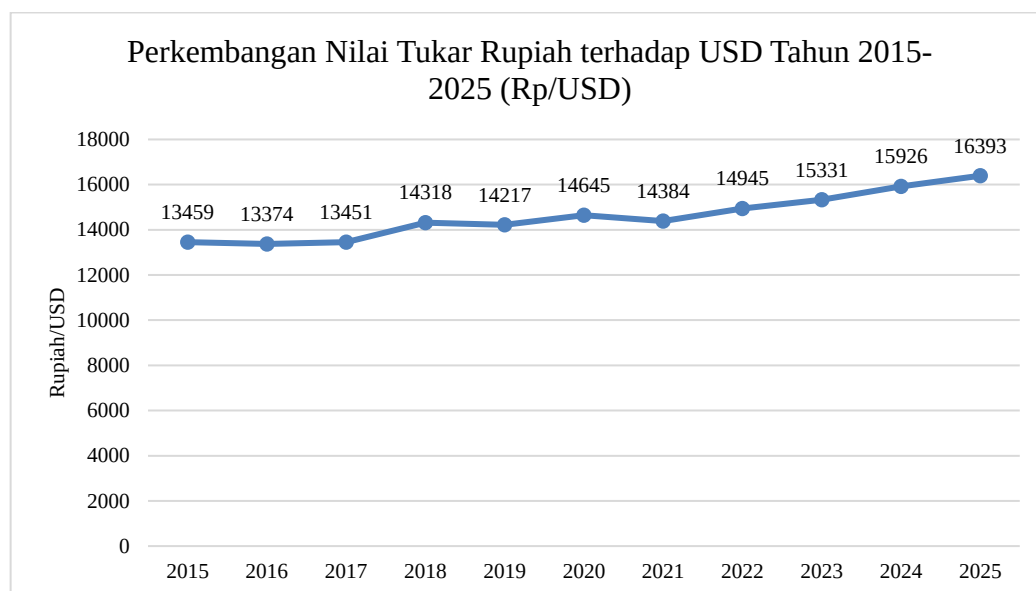
Gambar 1.2 Perkembangan Harga Emas Dunia 2015-2025

Sumber: World Gold Council

Berdasarkan Gambar 1.2, harga emas dunia mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2015–2025. Harga emas meningkat dari USD1.160,1 per troy ounce pada tahun 2015 menjadi USD2.386,2 per troy ounce pada tahun 2025. Kenaikan yang paling tajam terjadi setelah tahun 2019, terutama pada masa pandemi Covid-19 dan periode meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Secara teoritis, kenaikan harga emas dapat mendorong masyarakat mengalihkan sebagian dana yang dimiliki ke aset emas karena dianggap lebih aman dalam menghadapi risiko inflasi dan gejolak ekonomi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi dana yang tersimpan pada sektor perbankan.

Faktor makroekonomi lainnya yang berpotensi memengaruhi penghimpunan DPK adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Nilai tukar sering digunakan sebagai indikator stabilitas ekonomi karena

mencerminkan kondisi pasar keuangan dan persepsi investor terhadap perekonomian suatu negara.



Gambar 1.3 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Tahun 2015-2025

Sumber: World Bank

Berdasarkan Gambar 1.3, nilai tukar Rupiah cenderung mengalami depresiasi dalam jangka panjang. Nilai tukar meningkat dari Rp13.459 per USD pada tahun 2015 menjadi Rp16.393 per USD pada tahun 2025. Meskipun sempat mengalami penguatan pada beberapa periode, tren jangka panjang menunjukkan melemahnya nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Depresiasi nilai tukar dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam mengalokasikan aset keuangan, termasuk keputusan untuk menyimpan dana pada sektor perbankan atau mengalihkannya ke aset lain yang dianggap lebih aman.

Apabila menelaah pergerakan harga emas dunia dan stabilitas mata uang, tekanan terhadap daya tarik instrumen simpanan domestik sejatinya sangat masif.

Harga emas mencatatkan tren *bullish* yang signifikan, terutama ketika terjadi guncangan ketidakpastian global di tahun 2020 di mana harga melonjak drastis dari 1.392,6 USD/ounce menjadi 1.769,6 USD/ounce, dan kembali melesat mencetak rekor tertinggi di level 2.386,2 USD/ounce pada tahun 2024. Kenaikan harga aset *safe haven* yang eksponensial ini terjadi secara beriringan dengan tren depresiasi nilai tukar Rupiah, yang secara persisten melemah dari posisi Rp13.459 per USD (2015) hingga terdepresiasi menembus batas psikologis Rp15.926 per USD (2024). Dalam rasionalitas ekonomi terbuka, depresiasi kurs yang berkelanjutan ditambah iming-iming *capital gain* dari harga emas yang tinggi seharusnya memicu *currency substitution* dan pelarian modal ke luar dari sistem perbankan. Namun, hal tersebut terbukti tidak terjadi. Calvo dan Reinhart (2002) menjelaskan bahwa depresiasi nilai tukar pada negara berkembang sering kali memicu peningkatan permintaan aset berdenominasi valuta asing akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap stabilitas mata uang domestik (G. A. Calvo & Reinhart, 2002). Fenomena tersebut dapat mendorong perpindahan dana masyarakat dari instrumen simpanan domestik menuju aset berbasis foreign currency sebagai bentuk perlindungan nilai kekayaan.

Rentetan fakta empiris inilah yang mengonfirmasi bahwa perilaku deposan perbankan di Indonesia memiliki tingkat inelastisitas (*deposit stickiness*) yang tinggi. Kepercayaan masyarakat dan preferensi mereka terhadap likuiditas perbankan terbukti sangat tangguh mengabaikan hukum *opportunity cost*, baik dari godaan profitabilitas harga emas, maupun depresiasi nilai tukar Rupiah.

Kedalaman ketidaknormalan *deposit stickiness* di Indonesia menjadi semakin menarik jika menelaah struktur komposisi simpanan masyarakat. Selama

periode pengamatan, terjadi pergeseran struktural dalam Dana Pihak Ketiga, di mana proporsi dana murah atau *Current Account Saving Account* (CASA) yang terdiri dari giro dan tabungan cenderung mendominasi dibandingkan deposito berjangka (*time deposit*). Berdasarkan data perbankan nasional, rasio CASA konsisten berada di atas 55 persen terhadap total DPK, dan bahkan terus meningkat pada periode pasca-pandemi. Tingginya dominasi dana murah (CASA) dalam struktur DPK menunjukkan bahwa sebagian besar simpanan masyarakat bersifat transaksional dan berjaga-jaga (*transactional and precautionary balances*), bukan murni untuk tujuan investasi. Menurut Diamond dan Rajan (2001), struktur pendanaan berbasis simpanan ritel domestik cenderung lebih stabil selama periode tekanan ekonomi dibandingkan sumber pendanaan *wholesale* yang lebih sensitif terhadap perubahan sentimen pasar (Diamond & Rajan, 2001).

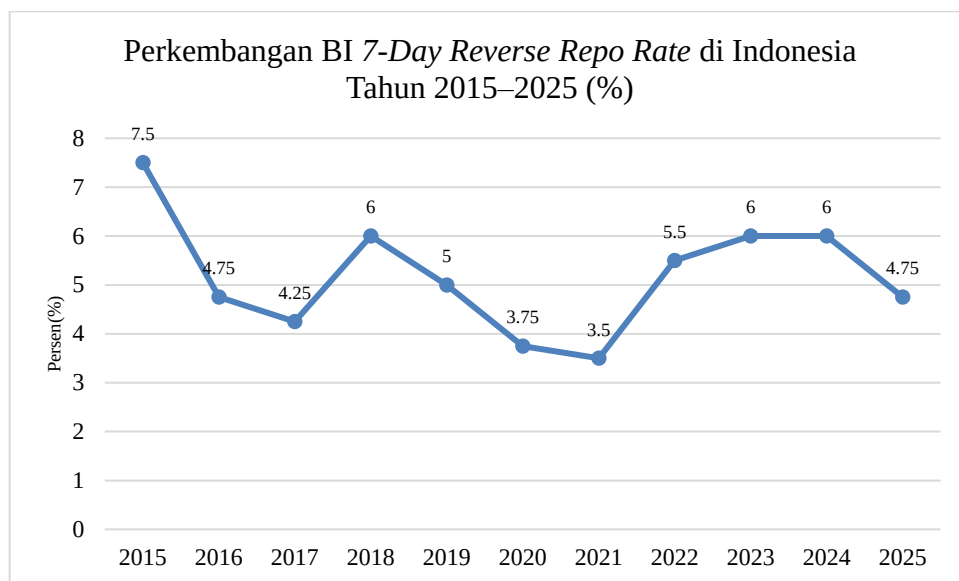
Tingginya porsi dana murah ini mengindikasikan bahwa sebagian besar dana yang mengendap di perbankan sejatinya memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap *opportunity cost* karena imbal hasilnya yang sangat rendah, atau bahkan berada di bawah tingkat inflasi riil. Secara rasional, depositan dengan profil CASA seharusnya menjadi pihak pertama yang menarik dananya untuk dialihkan ke instrumen safe haven seperti emas saat ketidakpastian makroekonomi memuncak. Namun, stabilitas pertumbuhan DPK justru ditopang oleh segmen dana murah ini, yang semakin memperkuat indikasi bahwa motif transaksional dan preferensi likuiditas ekstrem mengalahkan rasionalitas pencarian imbal hasil (*yield-seeking behavior*).

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya karakteristik khusus dalam perilaku deposan di Indonesia, yang dalam literatur keuangan sering dikaitkan dengan konsep *deposit stickiness*, yaitu kecenderungan simpanan masyarakat yang relatif tangguh (*resilien*) meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi secara drastis. Studi empiris menunjukkan bahwa fenomena ini umum ditemukan pada negara berkembang dengan tingkat inklusi keuangan yang baru bertumbuh serta keterbatasan diversifikasi instrumen investasi pasar modal yang mudah diakses oleh masyarakat luas (Demirgüç-Kunt & Huizinga, 2009; IMF, 2020).

Keputusan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan dan bahkan menambah simpanannya di perbankan di tengah tingginya inflasi dan harga emas mengindikasikan bahwa motif berjaga-jaga (*precautionary motive*), preferensi likuiditas, kemudahan akses digitalisasi layanan perbankan, serta persepsi keamanan dana yaitu jaminan LPS kemungkinan menjadi faktor struktural yang lebih dominan mengesampingkan rasionalitas makroekonomi tradisional. Konsep *deposit stickiness* dalam literatur perbankan merujuk pada kondisi ketika simpanan masyarakat tidak segera berpindah meskipun terjadi perubahan signifikan pada tingkat suku bunga, inflasi, maupun kondisi pasar keuangan (Drechsler et al., 2017). Fenomena ini umumnya ditemukan pada sistem keuangan yang masih didominasi sektor perbankan, di mana tingkat literasi investasi masyarakat relatif terbatas dan preferensi terhadap likuiditas cenderung tinggi.

Fenomena meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) di tengah fluktuasi harga emas, nilai tukar, dan BI Rate menunjukkan bahwa perilaku penghimpunan dana masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi

tersebut. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan likuiditas perbankan adalah *BI 7-Day Reverse Repo Rate* sebagai suku bunga kebijakan. Perubahan tingkat suku bunga tersebut berpotensi memengaruhi preferensi masyarakat dalam menyimpan dana pada sektor perbankan melalui perubahan tingkat imbal hasil simpanan.



Gambar 1.4 Perkembangan BI 7-Day Reverse Repo Rate di Indonesia Tahun 2015–2025

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.7, BI 7-Day Reverse Repo Rate mengalami fluktuasi yang cukup dinamis selama periode pengamatan. Tingkat suku bunga kebijakan tercatat sebesar 7,50% pada tahun 2015, kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 3,50% pada tahun 2021 sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi dan upaya pemulihan pascapandemi. Namun, seiring meningkatnya tekanan inflasi global dan pelemahan nilai tukar, Bank Indonesia

kembali menaikkan suku bunga hingga mencapai 6,00% pada tahun 2023–2024 sebelum turun menjadi 4,75% pada tahun 2025.

Menurut teori preferensi portofolio, perubahan suku bunga memengaruhi keputusan masyarakat dalam mengalokasikan kekayaannya di antara berbagai instrumen keuangan. Kenaikan suku bunga cenderung meningkatkan daya tarik simpanan perbankan karena menawarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, sedangkan penurunan suku bunga dapat mendorong masyarakat mencari alternatif investasi lain yang memberikan imbal hasil lebih besar. Oleh karena itu, *BI Rate* menjadi salah satu indikator moneter yang berpotensi memengaruhi dinamika penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada sektor perbankan.

Di sisi lain, hasil penelitian empiris sebelumnya menunjukkan temuan yang bervariasi. Arghyrou et al. (2023) menemukan bahwa kondisi makroekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas simpanan perbankan di kawasan Eropa (Arghyrou et al., 2023). Terkait dengan variabel harga emas, El Araby dan Petro (2024) secara empiris membuktikan bahwa daya tarik emas sebagai instrumen pelindung nilai (*safe haven*) bertindak sebagai aset substitusi yang spesifik mendikte fluktuasi total simpanan bank (Araby & Petro, 2025). Tren apresiasi harga emas memberikan tekanan kompetitif yang memengaruhi arah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), di mana nasabah cenderung mengalihkan likuiditas perbankannya menuju aset riil saat terjadi ketidakpastian. Hal ini diperkuat secara solid oleh penelitian domestik dari Prisilla dan Munawar (2024), yang secara konklusif membuktikan bahwa fluktuasi harga emas memiliki transmisi pengaruh negatif dan signifikan terhadap volume Dana Pihak Ketiga pada bank konvensional

di Indonesia (Prisilla & Munawar, 2024). Tren apresiasi harga emas memberikan tekanan kompetitif yang nyata, di mana nasabah cenderung menarik likuiditas perbankannya menuju kepemilikan aset riil saat terjadi ketidakpastian.

Selanjutnya, inflasi juga telah divalidasi sebagai determinan utama penghimpunan dana perbankan. Berdasarkan temuan empiris terbaru dari Khoirina et al. (2024), inflasi terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume deposito perbankan baik dalam transmisi jangka pendek maupun jangka panjang, karena fluktuasi tingkat harga secara langsung memengaruhi ekspektasi nilai riil simpanan masyarakat (Khoirina et al., 2024). Kesimpulan ini diperkuat secara solid oleh Hailu (2024) yang mengonfirmasi bahwa guncangan inflasi memberikan efek negatif yang signifikan secara statistik terhadap mobilisasi simpanan bank komersial. Depresiasi daya beli akibat inflasi tinggi menciptakan fenomena disinsentif struktural (Hailu, 2024). Meskipun demikian, respons depasan domestik sering kali menunjukkan karakteristik yang tidak normal. Studi yang dilakukan oleh Jatnika (2020) pada perbankan di Indonesia membuktikan bahwa inflasi merupakan determinan yang sangat signifikan memengaruhi DPK, di mana dalam kondisi tertentu, peningkatan inflasi justru memicu respons penumpukan dana akibat kuatnya motif berjaga-jaga (*precautionary motive*) dari masyarakat (Jatnika, 2020).

Sementara itu, volatilitas nilai tukar terbukti memiliki daya transmisi yang kuat terhadap ketahanan likuiditas bank. Penelitian Hailu (2024) menegaskan bahwa pergerakan nilai tukar (*exchange rate*) berinteraksi secara dinamis dalam memengaruhi perilaku mobilisasi simpanan (Hailu, 2024). Fluktuasi dan depresiasi kurs memicu kerentanan struktural yang meningkatkan kekhawatiran nasabah,

sehingga stabilitas nilai tukar sering kali dijadikan proksi utama oleh deposan domestik dalam merumuskan keputusan penahanan atau penarikan likuiditas di tengah tekanan ekonomi makro. Nofinawati (2018) juga menegaskan bahwa fluktuasi dan depresiasi kurs Rupiah menciptakan kerentanan struktural yang memicu kekhawatiran nasabah (Nofinawati, 2018). Kondisi depresiatif ini secara signifikan memengaruhi volume penghimpunan dana masyarakat, karena nilai tukar dijadikan proksi utama oleh deposan dalam merumuskan keputusan penahanan atau penarikan likuiditas di tengah ketidakpastian.

Selain ketiga variabel tersebut, literatur moneter juga menunjukkan bahwa jumlah uang beredar dan suku bunga kebijakan merupakan faktor yang berpotensi memengaruhi penghimpunan dana perbankan. Menurut teori likuiditas Keynes, peningkatan jumlah uang beredar akan memperbesar ketersediaan dana dalam perekonomian sehingga meningkatkan potensi penghimpunan simpanan perbankan. Secara empiris, Khoirina et al. (2024) menemukan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh signifikan terhadap volume deposito perbankan dalam jangka panjang. Temuan ini mengindikasikan bahwa ekspansi likuiditas ekonomi berpotensi meningkatkan dana yang masuk ke sistem perbankan.

Di sisi lain, suku bunga kebijakan berperan sebagai instrumen moneter yang memengaruhi insentif masyarakat dalam menyimpan dana pada perbankan. Teori portofolio menjelaskan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mengubah preferensi masyarakat dalam memilih instrumen keuangan yang memberikan tingkat pengembalian paling optimal. Penelitian Tripuspitorini (2020) menemukan bahwa *BI Rate* merupakan salah satu faktor makroekonomi yang memengaruhi

pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil serupa juga ditemukan oleh Nofinawati (2018), yang menunjukkan bahwa perubahan suku bunga memiliki keterkaitan dengan dinamika penghimpunan dana masyarakat pada sektor perbankan.

Meskipun berbagai penelitian telah menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap penghimpunan dana perbankan, sebagian besar studi masih berfokus pada pengaruh linier dan belum secara khusus menjelaskan fenomena persistensi simpanan (*deposit persistence*) pada negara berkembang. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti respons sektor perbankan terhadap suku bunga dan kebijakan moneter, sementara kajian mengenai interaksi simultan antara harga emas, nilai tukar, dan BI Rate terhadap perilaku DPK di Indonesia masih relatif terbatas.

Meskipun berbagai penelitian telah menganalisis pengaruh variabel makroekonomi dan moneter terhadap penghimpunan dana perbankan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengaruh parsial masing-masing variabel serta belum secara khusus menjelaskan fenomena persistensi simpanan (*deposit persistence*) yang terjadi pada negara berkembang. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan harga emas, nilai tukar, dan BI Rate sebagai determinan utama DPK dalam konteks perbankan Indonesia masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara prediksi teoritis, fenomena empiris, dan hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan inkonsistensi. Untuk membedah fenomena deposit stickiness

tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini difokuskan pada pengujian pengaruh harga emas, nilai tukar, dan BI Rate terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di Indonesia. Ketiga variabel tersebut dipilih karena merepresentasikan tiga sumber risiko utama yang dihadapi deposan, yaitu risiko substitusi aset melalui investasi emas, serta risiko eksternal yang tercermin dalam pergerakan nilai tukar.

Oleh karena itu, kajian empiris mengenai hubungan antara harga emas, nilai tukar, BI Rate, dan Dana Pihak Ketiga menjadi penting untuk memahami ketahanan likuiditas perbankan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) yang mampu mengidentifikasi dinamika penyesuaian jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang secara simultan. Selain itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Autiregressive Distributed Lag (ARDL) yang mampu mengidentifikasi dinamika penyesuaian jangka pendek dan jangka panjang secara simultan. Berdasarkan urgensi empiris, fenomena deposit stickiness, dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan judul: "**PENGARUH HARGA EMAS, NILAI TUKAR, DAN BI RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE 2015-2025.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di Indonesia serta pergerakan harga emas, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat selama periode 2015–2025?
2. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi yang terdiri dari harga emas, nilai tukar Rupiah, BI Rate terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di Indonesia dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguraikan gambaran perilaku serta pola pergerakan data historis mengenai penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank umum di Indonesia, beserta fluktuasi variabel makroekonomi yang meliputi harga emas, nilai tukar Rupiah, dan BI Rate selama periode pengamatan Januari 2015 hingga Desember 2025.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh transmisi variabel makroekonomi yang terdiri dari harga emas, fluktuasi nilai tukar Rupiah, dan BI Rate terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di Indonesia, baik ditinjau dari dinamika penyesuaian dalam jangka pendek maupun pembentukan titik keseimbangan dalam jangka panjang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya pada bidang ilmu ekonomi moneter dan perbankan. Adapun kegunaan teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bukti teoritis dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana transmisi variabel makroekonomi yakni harga emas, nilai tukar dan BI Rate memengaruhi perilaku penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Indonesia.
2. Menjadi tambahan literatur akademik untuk menguji relevansi teori portofolio dan teori permintaan uang terkait perilaku masyarakat dalam mengalokasikan kekayaannya di tengah fluktuasi perekonomian.
3. Memperluas kajian keilmuan mengenai fenomena ketidakpekaan simpanan dengan mengaplikasikan pendekatan model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) pada sektor perbankan.

1.4.2 Kegunaan Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi penulis, civitas akademika, serta pembaca pada umumnya. Adapun manfaat empiris yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi salah satu syarat akademik untuk menyusun skripsi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan
2. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan serta mengembangkan kemampuan analitis dan keterampilan ekonometrika sesuai dengan disiplin ilmu ekonomi yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.
3. Menjadi bahan referensi, literatur tambahan, maupun acuan pembandingan bagi akademisi atau peneliti selanjutnya yang akan mengkaji topik penelitian sejenis di masa mendatang.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan pembahasan dan agar penelitian ini lebih fokus serta terarah, maka ruang lingkup dan batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini difokuskan pada pengamatan data agregat penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada kelompok Bank Umum di Indonesia.
2. Pengujian variabel independen dibatasi pada tiga indikator makroekonomi, yaitu pergerakan harga emas, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan BI Rate.
3. Pengamatan dan penggunaan data runtut waktu (*time series*) dalam penelitian ini dibatasi mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2025.
4. Pendekatan analisis data yang digunakan dibatasi secara spesifik pada metode ekonometrika *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL).